

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ke 3 di dunia yang memiliki luas kawasan menyentuh angka 130,68 juta hektare. Tetapi laju degradasi hutan yang sangat meningkat, membuat luas kawasan hutan berkurang sangat pesat. Setiap tahunnya degradasi kawasan hutan di Indonesia mencapai sekitar 450 ribu hektare. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan Indonesia, luas kawasan hutan Indonesia yang awalnya sekitar 130 juta hektar, 42 juta hektar di antaranya sudah habis ditebang dan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan yang ada di Indonesia saat ini sekitar 124 juta hektar saja, tetapi sejak 2010 sampai dengan 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang menyentuh angka 684.000 hektar tiap tahunnya. Menurut catatan organisasi lingkungan yaitu Greenpeace, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia mencapai 300 ribu hektar di seluruh Papua setiap tahunnya.

Menurut informasi dari pemerintah daerah Papua, setiap tahunnya rata-rata deforestasi hutan di Papua sebesar 143.680 ha. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman hayati paling kaya di dunia. Sebagai negara agraris yang terdiri dari beragam pulau, kekayaan hayati di Indonesia meliputi beragamnya flora dan fauna di Indonesia, serta kualitas hutan-hutan tropis yang masih asri dan terlindungi. Beberapa flora dan fauna di hutan-hutan Indonesia pun tergolong endemik, yakni hanya dapat ditemui di Indonesia saja. Hal ini menunjukkan, sejatinya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah. Akan tetapi, bagusnya kualitas hutan di Indonesia selaras dengan rentan dan rawannya ekosistem tersebut di rusak. Di Indonesia, kawasan hutan yang semestinya menjadi habitat bagi satwa-satwa di lindungi, serta penyuplai oksigen untuk

lingkungan, malah justru menjadi sasaran bagi sekelompok golongan untuk disalahgunakan. Berbagai kepentingan yang dicanangkan oleh pemerintah, sedikit banyak juga ikut merusak populasi hutan. Aktivitas tambang batu bara dan perminyakan semisalnya, seringkali mengorbankan kawasan hutan untuk dijadikan sebagai lahan tambang.

Negara dan masyarakat senantiasa saling membentuk melalui upaya penguasaan dan penolakan di berbagai arena (Migdal dkk., 1994). Arena yang berkaitan dengan hutan mencakup hak kepemilikan, pembagian manfaat dari hutan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya hutan, peluang kerja, jaminan politik, infrastruktur, pengetahuan, dan akses terhadap informasi. Negara dan masyarakat memiliki jalur pengaruh yang berbeda. Pengaruh negara terhadap hutan biasanya berdasarkan penguasaan atas kebijakan, kegiatan kehutanan, atau kepemilikan hutan dan lahan hutan (Finger-Stich dan Finger, 2003). Di negara yang kaya dengan sumberdaya hutan seperti Indonesia, penguasaan oleh Negara seringkali terpusat pada departemen kehutanan di tingkat nasional. Unsur masyarakat dapat mempengaruhi melalui jejaring informal, gerakan sosial, atau pun organisasi-organisasi resmi seperti perusahaan, lembaga keagamaan, kelompok donor dan advokasi. Tetapi pada praktiknya masyarakat lokal kurang memiliki pengaruh resmi terhadap sumberdaya hutan yang bernilai tinggi.

Kerusakan hutan tersebut tidak hanya terjadi untuk skala besar. Di daerah pun, beberapa kebijakan pemerintah juga banyak yang berimbas pada rusaknya hutan sebagai akibat dari berbagai program yang dijalankan. Salah satunya di Kabupaten Dompu. Lahan Kritis adalah lahan yang ada di dalam atau di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. Jumlah lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 seluas 680.620 ha dan terdapat 230.000 ha lahan kritis berada di dalam kawasan hutan, 96.238 ha telah beralih fungsi menjadi tanaman semusim. Secara administratif Kabupaten Dompu sampai akhir tahun 2019 terbagi

dalam 8 (delapan) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) Desa, 9 Kelurahan, 41 Lingkungan dan 285 Dusun, dengan luas wilayah yaitu seluas 2.324,55 km² dan terdapat 65 (enam puluh lima) Desa/Kelurahan berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang berakibat pada kerawanan pemanfaatan lahan kawasan hutan tanpa ijin. Luas Kawasan hutan di Kabupaten Dompu adalah seluas 114.495 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) RTK (Register Tanah Kehutanan) dengan penyebaran Areal di sekeliling wilayah Kabupaten Dompu.

Pada zaman dulu hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat dimana pada saat itu masyarakat bergantung pada hutan sebagai sumber pangan bagi mereka, pada saat itu manusia masih hidup dengan cara berpindah – pindah demi memenuhi kebutuhan pangannya. Apa yang dilakukan manusia pada zaman dulu merupakan gambaran yang begitu jelas bahwa hutan dan manusia tidak dapat dipisahkan ketika hutan asri maka masyarakat akan hidup dengan sejahtera. Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat harus terus menjaga kelestarian hutan, dimana kita telah mengetahui sendiri bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yang meliputi sosial, lindung dan ekonomi.

Pemerintahan Kabupaten Dompu terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 memiliki program unggulan yang dikenal dengan sebutan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut). Diantara ketiga komponen tersebut, yang paling menjadi sorotan adalah program penanaman jagung. Selama dua periode kepemimpinan Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin, program penanaman jagung tersebut terbukti efektif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat Dompu. Hanya saja, meski memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi masyarakat dan pendapatan per kapita daerah, program ini memiliki kekurangan, yakni rusaknya hutan di daerah Dompu yang begitu massif akibat pembukaan lahan jagung. Sebagian besar hutan dan pegunungan di daerah Dompu sudah mengalami kerusakan parah, dengan dialihfungsikannya area hutan sebagai lahan penanaman jagung.

Alhasil, wilayah hutan yang masih terawat di daerah Kabupaten Dompu kini sudah sangat langka, bahkan nyaris tidak ada, karena hampir seluruh area hutan di Kabupaten kecil ini sudah dijamah oleh masyarakat, dan menjadi sasaran dari penebangan liar. Sejak awal hadirnya Program Pijar yang bermetamorfosis menjadi Program Terpijar bidang penanaman jagung. Dihajatkan untuk masyarakat tani dengan memanfaatkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Keberhasilan program jagung yang telah menjadi lokomotif penurunan angka kemiskinan di Bumi Nggahi Rawi Pahu telah menghipnotis masyarakat untuk melakukan pengembangan lahan. Tidak tanggung-tanggung, hutan lindung dan hutan tutupan negara yang dahulunya ditumbuhi pepohonan hijau, dibabat warga dengan alasan menanam jagung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rumah tangga.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada beberapa tahun kebelakang tidak begitu memperhatikan pengelolaan hutan yang bersifat berkelanjutan, dan lebih mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan keberlangsungan lingkungan hutan dalam jangka panjang yang dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi hutan dilakukan secara masif sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada dalam hutan serta berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.

Akibat kerusakan hutan yang timbul dikarenakan kegiatan eksploitasi hutan yang dilakukan secara masif dan tidak diawasi oleh pemerintah maupun *stakeholders* yang terkait, maka akan menimbulkan fungsi dan manfaat hutan secara cepat. Tidak hanya itu kepunahan akan keanekaragaman hayati akan selalu menghantui generasi yang akan datang. Kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Dompu beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan, baik itu terjadi pada hutan lindung maupun kawasan hutan produksi. Praktik deforestasi hutan ini, selain secara gamblang merusak komponen ekosistem lingkungan di Kabupaten Dompu, juga menimbulkan beragam permasalahan lain, yang timbul dan menjadi efek domino dari maraknya penebangan hutan liar. Permasalahan-permasalahan yang menjadi isu lingkungan

tersebut diantaranya meliputi: Dompu merupakan daerah yang rawan diterjang banjir. Hampir setiap musim hujan tiba, bisa dipastikan beberapa daerah di Kabupaten Dompu seketika menjadi sasaran dari banjir tersebut, terutama dikala intensitas hujan yang tinggal.

Salah satu penyebabnya, seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama tulisan ini, karena begitu banyaknya lahan tandus di Kabupaten Dompu sebagai akibat dari maraknya praktik penebangan liar yang mengakibatkan daerah resapan air semakin sedikit, sehingga bila turun curah hujan dengan intensitas tinggi, air-air tersebut dapat dengan mudah menerobos pemukiman warga. Selain itu, faktor lainnya adalah karena banyaknya penumpukan sampah di sejumlah lokasi, terutama di titik-titik yang membuat aliran sungai terhambat. Salah satu kasus teranyar adalah Banjir yang terjadi pada November 2021 lalu, di mana banjir tersebut merendam rumah warga di dua kecamatan. BPBD kabupaten Dompu mencatat Saat banjir terjadi sebanyak 518 rumah warga yang berada di Desa Wawonduru, Kelurahan Kandai Dua yang berada di Kecamatan Woja. Rentannya Kota Dompu menjadi sasaran banjir faktor utamanya karena deforasi hutan besar-besaran di seujur wilayah pegunungan dan hutan-hutan tropis di Kabupaten Dompu.

Keberadaan hutan yang semestinya menjadi reseptor bagi tetesan air hujan yang merembes menjadi tidak ada, sehingga air dengan leluasa masuk ke pemukiman warga. Selain banjir, permasalahan lingkungan yang timbul dari praktik defortasi hutan ini adalah satwa-satwa lokal yang biasa ditemui di hutan-hutan setempat, keberadaannya semakin langka, bahkan beberapa sudah tidak pernah dijumpai lagi. Sebelum program penggundulan hutan besar-besaran, di kawasan hutan dan pegunungan Kabupaten Dompu dulunya masih banyak dijumpai spesies Landak Jawa (*Hystrix Javanica*), yang biasa disebut dengan sebutan “Dudu” oleh masyarakat lokal. Namun sekarang, keberadaan Landak sudah sangat langka, bahkan bisa dikatakan hampir punah mengingat satwa ini kini sangat susah ditemui di Dompu.

Langkanya keberadaan landak bukan tanpa alasan, mengingat hilangnya habitat alami dari landak yang sudah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian seperti lading jagung dan tebu mengakibatkan susah bagi spesies ini untuk dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hilangnya landak dari kawasan hutan Kabupaten Dompu tentunya akan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem bagi alam setempat. Selain landak, satwa lain yang semakin sulit ditemui keberadaannya adalah Rusa Timor dan Musang Pandan, kedua satwa eksotis itu harus mendapati dirinya terperangkap, terjebak di lading-ladang jagung milik warga yang sudah dialihfungsikan.

Tempat yang tadinya merupakan rumah bagi para satwa ini, kini sudah tidak lagi menjadi tempat sebagaimana mestinya. Hasilnya, tak jarang satwa-satwa tersebut masuk ke area ladang milik warga, yang bahkan dapat membahayakan dan mengancam nyawa masyarakat. Realitanya, di berbagai lahan jagung dan ladang-ladang di Kabupaten Dompu para petani sering berjumpa dengan berbagai jenis ular dengan intensitas yang masih sangat tinggi. Ular-ular berjenis sanca, derik, bahkan kobra sangat mudah ditemui di sekitar lading-ladang tersebut dan potensi perjumpaan dengan manusia sangat tinggi. Hal ini tentunya berbahaya bagi keselamatan petani. Namun, peristiwa tersebut juga tidak lepas dari aktivitas deforestasi hutan yang secara langsung mengakibatkan hilangnya habitat alami dari para satwa-satwa liar di Kabupaten Dompu.

Habitat para satwa yang telah hilang karena adanya lahan kritis hutan. Para satwa tidak memiliki tempat tinggal, kehilangan sumber makanan, kehilangan keluarga mereka. Jika hutan tidak segera direhabilitasi maka para satwa bisa saja pergi menuju pemukiman warga untuk mencari makan dan mencari tempat tinggal.

Akibat adanya pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat menimbulkan berbagai masalah serta semakin luasnya lahan yang mengalami kritis diakibatkan dengan adanya erosi serta degradasi tanah yang semakin meluas. Yang berdampak pada terjadinya bencana alam seperti banjir. Belakangan ini Kabupaten Dompu telah terjadi

bencana banjir bandang yang menimpa daerah-daerah daratan rendah hal tersebut menandakan bahwa penggunaan lahan hutan sebagai lahan pertanian tidak diimbangi oleh masyarakat dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya erosi oleh air hujan. Pada saat ini kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Kabupaten Dompu sebagai lahan pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2019 penggunaan kawasan hutan lindung seluas 8378,45 Ha dan pada saat ini menjadi 43624,28 Ha.

Pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian akan menimbulkan banyak permasalahan untuk kedepannya apabila tidak diimbangi dengan penanaman kembali atau reboisasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak hanya itu pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian akan menghilangkan ekosistem hutan yang sudah ada dari dulu. Pada saat ini pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Dompu telah mencapai luas 43624,28 Ha.

Untuk memperbaiki kerusakan hutan itu, Pemerintah Kabupaten Dompu telah mendisain program penghijauan di tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan menanam pohon produktif yang memiliki nilai jual tinggi, seperti Sengon, Rambutan dan Duren sejumlah 500 Ribu Pohon. Pemerintah Kabupaten Dompu tidak hanya berdiam diri saya melihat kerusakan yang di timbulkan oleh kegiatan masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai lahan pertanian yang mengakibatkan terganggunya vegetasi serta ekosistem hutan dan bahkan mengakibatkan bencana bagi masyarakat itu sendiri, maka dari pemerintah Kabupaten Dompu bekerjasama dengan masyarakat melalui program yang dibuat oleh pemerintah dimana program tersebut bertujuan untuk mendukung serta memfasilitasi program kemitraan dengan kelompok masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan serta memanfaatkan dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang dapat bermanfaat bagi hutan itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Dengan meningkatnya pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Dompu menyebabkan degradasi lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta meluasnya wilayah yang berpotensi bencana. Maka dari itu besar harapan penulis bahwa pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian dengan memperketat pemberian izin alih fungsi lahan, menetapkan zona vegetasi hutan, serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tanpa adanya izin dari pemerintah. Namun hal tersebut akan sulit dilakukan mengingat bahwa sebagian besar profesi dari masyarakat Kabupaten Dompu adalah petani jagung serta komoditas yang unggulan di Kabupaten Dompu adalah jagung mengingat hal tersebut peran pemerintah dan para petani jagung sangatlah penting bagi sektor ekonomi.

Berdasarkan masalah dengan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dalam menjaga dan melindungi hutan akibat dialih fungsikan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Dompu serta berdasarkan latar belakang dan penguatan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Dalam Rehabilitasi Kawasan Hutan Gundul.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana peran dinas lingkungan hidup kabupaten dompu dalam rehabilitasi kawasan hutan gundul?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup kabupaten dompu dalam rehabilitasi kawasan hutan gundul.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat berupa.

1. Secara Akademis

Merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian pada pokok permasalahan yang sama.

3. Secara Praktis

Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Dompu serta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kerusakan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Dompu.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan kepada masyarakat Kabupaten Dompu serta bisa menjadi referensi untuk memberikan semangat gotong royong dan bekerja sama dalam menangani kerusakan kawasan hutan yang terjadi di Kabupaten Dompu.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2003, dengan judul **“Kebijakan Penyusunan Masterplan Rehabilitasi Hutan dan Lahan”** ini berisi tentang Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Departemen Kehutanan dalam rangka tindak lanjut rehabilitasi hutan dan lahan gundul. Dalam buku ini juga disebutkan angka-angka dehumanisasi di seluruh hutan Indonesia mulai tahun 1997-2000. Statistik dehumanisasi kawasan hutan Indonesia ini hanya mencakup hutan yang ada di pulau besar di Indonesia yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Jawa. (Departemen Kehutanan, 2003).

Penelitian ini dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 yang dimuat dalam jurnal balitbang Jatim Vol. 5 No. 1, bulan ke- 1, 2006, dengan judul penelitian **“Potensi masyarakat desa sekitar hutan perbatasan antar kabupaten dan antar propinsi dan pola pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar hutan”** Lokasi penelitian adalah Bojonegoro dan Ngawi. Dalam laporan hasil penelitian ditemukan beberapa hal yaitu: kerusakan hutan yang telah terjadi pada semua fungsi kawasan hutan merupakan akibat dari lemahnya penegak hukum, eksploitasi hukum berlebihan, pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain (perkebunan, pertambangan, industri) dan sebagainya, pencurian kayu hutan, perambahan, penebangan hutan serta rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap kelestarian hutan. Selain itu ada juga temuan bahwa kerusakan hutan berakibat terhadap masyarakat sekitar hutan yaitu kesulitan memperoleh kayu bakar, pakan ternak, dan air bersih. Kedalaman sumur saat periode 1970-an hanya 11-12 meter, saat ini sudah mencapai 17-19 meter, sumber air yang digunakan untuk irigasi teknis sudah sangat kurang debitnya bahkan di beberapa tempat sudah kering.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widyasasi, Ruhayat, & Sutisna, 2015), dengan judul penelitian **“Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Beberapa Jenis Tanaman HTI pada Areal Rehabilitasi Hutan Bekas Kebakaran PT ITCI Kartika Utama”**. ini Memaparkan tentang macam tanah yang berkembang pada areal rehabilitasi hutan bekas kebakaran, evaluasi kualitas dan

karakteristik lahan hutan bekas kebakaran berat dan sangat berat di areal HPH PT ITCI Kartika Utama bagi pertumbuhan jenis-jenis tanaman yang diusahakan, khususnya Gemilina, Mangium, dan Jati serta mengetahui factorfaktor pembatas pertumbuhan tanaman yang akan diusahakan dari setiap sistem lahan yang diteliti sesuai dengan tingkat kesesuaian lahannya masingmasing. Penelitian dilakukan pada 5 tempat yaitu Mentalat, Teweh, Tewai Baru, Lawanguwang, dan Beriwit. Berdasarkan peta tingkat kebakaran PT ITCI Kartika Utama, diperoleh informasi bahwa luas areal hutan terbakar pada areal HPH tersebut adalah: areal hutan terbakar ringan = 5.420 Ha, terbakar sedang = 40.899 Ha, terbakar berat = 2.652 Ha, dan terbakar sangat berat = 54.710 Ha.

Hutan tropis yang memiliki iklim isothermal dengan musim kemarau yang panas dan curah hujan yang tinggi sebanyak satu atau dua kali dalam setahun ini memiliki kelas kesesuaian lahan S3 (Lahan agak sesuai) untuk ketiga jenis tanaman yaitu Gmelina, Mangium, dan Jati. Faktor pembatas bagi jenis Mangium dan Gmelina pada sistem lahan Mentalat adalah rendahnya ketersediaan hara (N, P, K) dan tingginya kejenuhan Alumunium, sedangkan sistem lahan Teweh adalah rendahnya ketersediaan hara (N,K) dan tingginya kejenuhan Al, sedangkan pada sistem lahan Tewai Baru adalah rendahnya ketersediaan hara (N, P, K), tingginya kejenuhan Al dan terrain. Bagi jenis Jati factor pembatas pada setiap sistem lahan, selain dari factorfaktor pembatas seperti tersebut diatas, ada faktor pembatas tambahan berupa melimpahnya curah hujan rata-rata setiap tahun. (Widyasasi, 2005).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmi, 2019) dengan Judulu **“Kajian Kondisi Fisik Tanah Akibat Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Jagung di Desa Songgaja Kabupaten Dompi”**, Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi fisik tanah akibat alih fungsi hutan menjadi lahan jagung intensif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. baik dari hasil pengamatan dilapangan maupun hasil analisis di laboratorium, maka dapat disimpulkan bahwa pada lahan hutan memiliki persentase pasir dan debu lebih rendah dibanding lahan jagung.

Sedangkan persentase liat pada hutan lebih tinggi dibanding lahan jagung. Sehingga lahan hutan memiliki kelas tekstur lempung dan lahan jagung memiliki kelas tekstur lempung berpasir. Lahan Jagung memiliki keleregan (0-8%) yang termaksud dalam kelas I yaitu datar, dan pada lahan hutan memiliki kelerengan (8-15%) yang termaksud dalam kelas II yaitu landai. Alih fungsi hutan menjadi lahan jagung di Desa Songgajah menunjukkan bahwa belum terjadi pemadatan tanah, dengan nilai Berat Volume (BV) tanah kisaran (0,78- 0,93 g/cm³) dan Berat Jenis (BJ) tanah kisaran (5,03-5,05 g/cm³).

Menurut (Shafiani, 2020), dengan judul penelitian **“Dampak Kebijakan Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Jagung Terhadap Kawasan Hutan di Propinsi NTB”** peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung menjadi strategi pembangunan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Perluasan lahan pertanian menjadi pilihan strategi peningkatan produksi dan produktivitas khususnya pada tanaman jagung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung merupakan strategi kebijakan pemerintah agar dapat mencapai swasembada pangan. Perluasan areal tanam ditempuh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, berakibat pada perambahan kawasan hutan. Hutan tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi petani di sekitar kawasan hutan, oleh karena itu mereka mengalih fungsi kawasan hutan menjadi areal tanam tanaman jagung. Kegiatan ini dapat mengakibatkan penurunan sumber daya lingkungan dan kualitas lahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aris Jatmiko, 2012), dengan judul penelitian **“Evaluasi Kegiatan Rehabilitas Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Multikriteria (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah”**. Penelitian ini mengevaluasi tentang program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Evaluasi RHL diperlukan dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan RHL, menekan risiko kegagalan dan meningkatkan

kemungkinan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan perangkat kriteria dan indikator keberhasilan RHL, serta menggunakan perangkat kriteria dan indikator tersebut untuk menilai keberhasilan RHL di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurut (Aris Jatmiko, 2012) Program RHL yang dilakukan oleh Pemerintah Wonosobo mencapai skor sebesar 0,80, dalam rentang skor 0,33-1. Persentase tingkat keberhasilan kegiatan RHL adalah sebesar 70,55 %, termasuk dalam predikat “sedang” sehingga masih perlu diadakan penyempurnaan kegiatan RHL di masa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mamuko, Walangitan, & Tilaar, 2016), dengan judul **“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”** bertujuan untuk mendeskripsikan Persepsi dan Partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan dan lahan serta menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Menurut hasil review data dan peta lahan kritis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 luas lahan dengan kategori tidak kritis seluas ± 41,86 Ha, Potensial kritis 32.240.84 Ha, Agak kritis 33,239.94 Ha, Kritis 20,595.69 Ha dan kategori sangat kritis seluas ± 2,347.04 Ha. Luas lahan kritis diperkirakan bertambah, penyebab pertambahan luas lahan kritis tersebut diantaranya disebabkan oleh aktifitas perluasan pemukiman, pertambangan di luar dan dalam kawasan hutan, perladangan serta kerusakan vegetasi akibat bencana alam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mamuko, Walangitan, & Tilaar, 2016) menunjukkan tingkat persepsi responden terhadap hutan dan fungsinya persepsi tinggi sebesar 48%, sedang 45,1% dan persepsi rendah 6,9%. Selanjutnya tingkat persepsi terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan terbagi atas tinggi 51%, sedang 35% dan rendah 10%. Corelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa tingkat persepsi dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan. Hasil analisis partisipasi menunjukkan

bahwa 36,27% tergolong partisipasi tinggi, sedang 34,31% dan 29,41% rendah. Corelasi Rank Spearman menunjukkan partisipasi dipengaruhi juga oleh faktor tingkat pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sidu & Sugihen, 2007), dengan judul **“Pemberdayaan Kawasan hutan lindung jompi kabupaten muna provinsi Sulawesi tenggara”**, mengevaluasi tentang pemberdayaan Kawasan hutan lindung jompi kabupaten muna provinsi Sulawesi tenggara, dengan menitik beratkan aspek bentuk dalam kegiatan pemberdayaan, dan faktor faktor dalam pemberdayaan. Sedangkan dalam Faktor proses pemberdayaan warga masyarakat dan kemampuan pelaku pemberdayaan merupakan dua faktor yang penting dalam meningkatkan keber dayaan masyarakat melalui perbaikan proses pemberdayaan warga masyarakat terutama pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan meningkatkan kemampuan pelaku pemberdayaan, terutama terkait peningkatan ketrampilan dan sikap keberpihakan pada masyarakat. Secara empirikal model hubungan dan besarnya pengaruh faktor-faktor modal fisik, modal manusia, dan modal sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas dan kapabilitas masyarakat masih relatif rendah. Kondisi ini dihasilkan dari modal fisik, manusia, dan sosial dalam masyarakat. Demikian pula, rendahnya kapabilitas fasilitator pemberdayaan dan proses pemberdayaan juga berkontribusi pada situasi ini. Model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan lindung yang efektif adalah model yang mengintegrasikan modal fisik, manusia, dan sosial, serta kemampuan fasilitator dan proses pemberdayaan untuk menciptakan kekuatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung. Kawasan Hutan Lindung Jompi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mawardi & Sudaryono, 2006), dengan judul **“Pemberdayaan Kawasan hutan lindung jompi kabupaten muna provinsi Sulawesi tenggara”**, adalah mengenai proteksi hutan dan lahan dengan memberdayakan masyarakat yang tinggal di dekat kawasan hutan lindung dengan fokus pada isu-isu seperti ancaman, illegal

logging dan fragmentasi kewenangan di era lokal. otonomi. Dalam PP No. 34 Tahun 2002, perhutanan sosial bertujuan untuk mencapai kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat yang tinggal disekitar hutan tersebut. Selain itu pemerintah indonesia melalui Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Penguatan Masyarakat Lokal di sekitar hutan kemasyarakatan (PP No. 34 Tahun 2002).

Peneliti berkesimpulan penggunaan pendekatan ini karena untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. masyarakat enclave, masyarakat adat, dan melalui hutan kemasyarakatan, pendekatan ini memiliki motivasi yang kuat. Kami tahu bagaimana memberdayakan hutan dan melindungi serta menggunakan sumber daya hutan di habitatnya.

Penelitian (Suwarno & Bramantyo, 2019) dengan judul penelitian **“Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri”** mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan masyarakat di sekitar hutan di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. tetapi untuk memahami situasi atau latar belakang tertentu seperti apa adanya, penelitiannya difokuskan pada isu kawasan hutan lindung yang bersinggungan dengan pemukiman komunal, upaya konservasi untuk memaksimalkan dan memaksimalkan hutan. Produktifitas. Upaya pengelolaan dilakukan dengan pembentukan kelembagaan atau kerjasama dalam bentuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHBM). Pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah hasil yang didapatkan dari program tersebut. Kegiatan ini justru memperkuat masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan, contohnya di bidang pertanian, dan juga program ini bisa mendukung pemerintah dalam melakukan pemantauan atau merawat generasi muda.

Penelitian yang dilakukan Oleh Nursyafni Atikah (2019) **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung”** Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kampar mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung. Permasalahan dimulai dengan adanya keluhan masyarakat terhadap masuknya air limbah dari anak sungai Tapung disinyalir berasal dari berbagai aktifitas kegiatan industri yang berdiri sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Tapung mengakibatkan keresahan bagi masyarakat. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung serta mengetahui hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam melaksanakan peran pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung.

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan informan yang berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain 1) Pencegahan, 2) Penanggulangan, 3) pemulihan. Namun setelah dilakukan penelitian, ketiga indikator tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya. Faktor penghambatnya antara lain adanya keterbatasan anggaran, waktu yang penelitian terdahulu menjadi landasan bagi penulis untuk meneliti permasalahan ini khususnya terkait masalah hutan gundul yang ada di Kabupaten Dompu. Penelitian ini menarik karena peneliti menggunakan teori peran pemerintah dengan melihat adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam penanganan hutan gundul di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Arif (dalam Nurdin, 2014), yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

1.6 Kajian Teori

1. Teori peran pemerintah

Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat :
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:
 1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
 3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan-peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. Peranan yang diharapkan (expected roles) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya; dan
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajibankewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan

ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibankewajibannya

Menurut Anderson, salah satu fungsi dasar pemerintah yaitu menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat (resolution and adjustment of conflict). Pemerintahan dan Negara pada dasarnya didirikan untuk memecah atau mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian keadilan, ketertiban dan stabilitas. Oleh karenanya pemerintah harus bisa memberikan perlindungan misalnya kepada masyarakat yang memiliki posisi ekonomi lemah menghadapi keserakahan orang yang secara ekonomi lebih kuat

a. Definisi Konseptual

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menggambarkan penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat setempat di Kabupaten Dompu Metode ini mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah peran pemerintah upaya memperbaiki kerusakan hutan.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dalam arti sebagai acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana mestinya variabel dapat diukur. Untuk memudahkan menganalisa data maka penulis memberikan batasan-batasan dan alat ukur dengan maksud untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini merujuk pada indikator yang terdapat di teori *role theory* dalam pandangan Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

kerjasama antar aktor, antar [organisasi](#) atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent serta memungkinkan adanya jejaring (*networking*) (Dwiyanto, 2015:266) yang luas dan kemitraan (*partnership*) yang kuat serta bersifat sinergis (Dwiyanto, 2015:250). Iqbal (2007:90) dan Dwiyanto (2015:266) terdapat aktivitas partisipasi (*participative*) yang merupakan media dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah.

Sehingga agar tidak bias, turunan alat ukur penelitian dari masing-masing variabel diatas untuk mencapai jawaban penelitian yang diambil dapat dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Variabel Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Alat Ukur
<i>Peran</i>	Kemitraan <i>(Partnership)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam permasalahan hutan. 2. Adanya aturan Dasar yang melekat sebagai landasan dan Pegangan.
	Partisipasi <i>(participative)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga dan Masyarakat mengelola hutan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang berlaku.

Variabel	Indikator	Alat Ukur
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya kesadaran yang tinggi demi untuk menjaga dan melindungi hutan yang dilarang oleh pemangku kepentingan. 3. Adanya pertemuan berkala pemangku kepentingan dengan masyarakat dengan tetap memegang prinsip demokrasi dan musyawarah.
	<p>Hasil dari Proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan. 2. Adanya hubungan fungsional kerjasama antara pemangku kepentingan. 3. Adanya Komitmen yang kuat atas kesepakatan yang dibangun antara pemangku kepentingan. 4. Adanya pemahaman bersama akan aturan yang melekat demi untuk mencapai hasil kolaborasi yang baik antara Pemegang kepentingan dengan masyarakat.

Sumber: Dwiyanto (2015) diolah oleh penulis

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan objek di alam, peneliti adalah sarana utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara detail pada saat meneliti subjek tertentu sebanyak mungkin. Subjek dalam penelitian jenis ini adalah sebagai alat kita untuk meneliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan pada hutan dan lahan gundul yang berada di Kabupaten Dompu, dan juga di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Alasan penetapan lokasi ini, dikarenakan hutan Dompu menjadi perhatian nasional sejak tahun 2020 mengingat banyaknya hutan gundul yang dibabat habis oleh petani jagung.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik penelitian langsung ke objek penelitian. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut.

i. Observasi

Merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati orang, peristiwa, atau mencatat karakteristik fisik dalam setting alami mereka. Observasi dapat dilakukan secara terbuka (subjek tahu bahwa mereka sedang diamati) atau terselubung (tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi).

ii. Wawancara

Wawancara biasanya merupakan percakapan tatap muka antara peneliti dan peserta yang melibatkan transfer informasi kepada pewawancara (Cresswell, 2012). Peneliti akan menyelidiki setiap instrumen pengumpulan data secara independen, dimulai dengan wawancara. Sasaran wawancara adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.
- b. Kepala Seksi Kehutanan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Kelompok Hutan Kemitraan.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menggabungkan kumpulan data. Dokumentasi yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara, catatan lapangan dan berkas dari instansi.

iv. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, majalah, atau sumber data yang lain untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut.

1.9.4 Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

1.10 Data Primer

Data primer adalah data yang diterima atau didapatkan secara langsung dari narasumber utama dan tidak melalui perantara sehingga bisa juga disebut datanya masih mentah sehingga

harus diolah lagi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan bisa mengambil kesimpulan. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perseorangan misalnya hasil dari wawancara, atau yang berasal dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti **Husein Umar (2013)**. Dalam penelitian ini diperoleh data yang didapat secara langsung seperti hasil jawaban wawancara dengan anggota masyarakat yang berperan sebagai informan kunci, hasil observasi di lapangan, data pengetahuan silvikultur masyarakat, partisipasi masyarakat serta Pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dompu.

1.11 Data Sekunder

Menurut Sanusi (2012) Data sekunder adalah data yang disediakan dan dikumpulkan oleh pihak ketiga selain lembaga yang diteliti Data sekunder adalah data penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya dan dapat diakses oleh peneliti. Istilah ini kontras dengan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan informasi mengenai hutan dan lahan di Kabupaten Dompu. Didukung dengan studi pustaka pada penelitian terdahulu. Sumber-sumber yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya sumber ini berposisi sebagai pendukung data primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam data primer.

1.11.1 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pengumpulan informasi dan pemodelan data yang bertujuan untuk menginformasikan kesimpulan dan keputusan yang telah diambil. Menurut (Harahap, 2020) teknik analisis data Dimulai dari melakukan pengumpulan data, menyeleksi

data yang sudah di peroleh, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Menurut (Hadi, Asrori, & Rusman, 2021) Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, Salah satu tujuan analisis data adalah menemukan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik, yang jawabannya dicari baik dalam kumpulan data yang ada maupun dalam pengumpulan data selanjutnya.